

secara resmi sudah masuk ke dalam peta yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Peristiwa ini kemudian langsung mendapatkan respon dari pemerintahan Indonesia disebabkan Cina tidak mempunyai dasar atas klaim tersebut, yang secara sah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam upayanya merespon klaim dari Cina terhadap Kepulauan Natuna, pemerintah Indonesia sendiri melakukan berbagai cara misalnya melalui negosiasi dan diplomasi. Pemerintah Indonesia mengutamakan jalur dialog dalam menyikapi perselisihan klaim wilayah di Laut Cina Selatan oleh Cina.

Pada dasarnya, dasar hukum kepemilikan Indonesia atas semua pulau di Natuna ini sudah cukup kuat. Hal ini terkait dengan sabuk sakti laut teritorial 12 mil yang telah dideklarasikan oleh Djuanda pada tahun 1958. Berdasarkan hal tersebut kemudian, Indonesia memiliki posisi yang sangat kuat atas kepemilikan Kepulauan Natuna. Lebih jauh lagi, dialog dan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dapat dikatakan berhasil, mengingat dapat terselesaikannya masalah ini dengan Cina. Cina kemudian mengakui bahwa Kepulauan Natuna adalah merupakan bagian dari wilayah Indonesia, dan bukan bagian dari wilayah Cina.

Diplomasi merupakan jalur yang sangat tepat atas penyelesaian klaim Cina pada Kepulauan Natuna karena dalam waktu singkat Cina mengakui bahwa Kepulauan Natuna milik sah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun ke depan Indonesia harus membentangkan perhatian yang khusus pada konflik di Laut Cina Selatan karena konflik ini memiliki dinamika yang sangat tinggi yang dapat menyeret Indonesia ke dalam konflik tersebut. Selain itu, dengan adanya klaim Cina di atas yang dapat diselesaikan secara diplomasi, pemerintah Indonesia segera menyelesaikan masalah perbatasan yang belum

dapat diselesaikan dengan beberapa Negara tetangga secara baik. Selain itu, pemerintah diharuskan meningkatkan peranan Badan Nasional Penanganan Perbatasan (BNPP) di daerah perbatasan Indonesia di Kepulauan Natuna dengan pembangunan infrastruktur serta mengirimkan sebanyak mungkin transmigrasi ke wilayah ini. Usaha ini penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.